



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai 2, Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat 10710; Telepon (021) 3865130, 3814411; Faksimile (021) 3846402; Laman www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-53/PB/2024

24 Maret 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 pada Satker BLU

Yth. Para Pemimpin BLU (sebagaimana terlampir)

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Ketentuan Umum

1. Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas tahun 2024 merupakan wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara bagi Aparatur Negara, Pensiunan, dan Penerima Tunjangan yang diberikan sebagai upaya untuk mempertahankan tingkat daya beli masyarakat melalui pembelanjaan Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 sebagaimana dimaksud di atas merupakan petunjuk teknis atas pelaksanaan pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas pada seluruh satuan kerja pada instansi pemerintah, termasuk satker yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (satker BLU).

II. Penerima THR dan Gaji Ketiga Belas

THR dan/atau Gaji Ketiga Belas pada satker BLU diberikan kepada:

1. Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan/atau Pegawai pada BLU baik yang berasal dari PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota POLRI, maupun tenaga profesional non-PNS.
2. Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas Ketua dan Anggota, Sekretaris Dewan Pengawas, anggota Komite Audit, dan anggota Sekretariat Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLU sesuai dengan struktur organisasi yang ada pada BLU.
3. Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas dikecualikan untuk Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai pada BLU yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar instansi Pemerintah.

III. Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas pada Satker BLU

Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas pada satker BLU dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas pada BLU yang **telah menerapkan remunerasi** sesuai Keputusan Menteri Keuangan.

- a. THR dan Gaji Ketiga Belas bersumber dari Rupiah Murni dan/atau PNBP BLU dengan komponen berupa gaji dan tunjangan kinerja berupa insentif sesuai ketentuan yang berlaku terkait remunerasi BLU.
 - b. Gaji sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan sebesar gaji yang dibayarkan pada bulan Maret 2024 untuk THR dan bulan Mei 2024 untuk Gaji Ketiga Belas, dengan ketentuan:
 - 1) Untuk Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai BLU yang berasal dari PNS/PPPK/Prajurit TNI/Anggota POLRI berupa gaji yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni dan/atau PNBP BLU.
 - 2) Untuk Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional non-PNS/Prajurit TNI/Anggota POLRI berupa gaji yang bersumber dari PNBP BLU.
 - 3) Untuk Dewan Pengawas, komponen yang dibayarkan berupa honorarium yang bersumber dari PNBP BLU.
 - c. Tunjangan kinerja berupa insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan dengan ketentuan:
 - 1) Untuk Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai BLU diperhitungkan sebesar insentif yang dibayarkan pada bulan Maret 2024 untuk THR dan bulan Mei 2024 untuk Gaji Ketiga Belas dengan perhitungan capaian kinerja (*key performance indicators*) normal 100% sebagaimana diatur dalam KMK tentang penetapan remunerasi masing-masing BLU.
 - 2) Untuk Dewan Pengawas diperhitungkan sebesar insentif yang dibayarkan pada bulan Maret 2024 untuk THR dan bulan Mei 2024 untuk Gaji Ketiga Belas dengan perhitungan capaian indikator kinerja (*key performance indicators*) Pemimpin BLU normal 100% sebagaimana diatur dalam KMK tentang penetapan remunerasi masing-masing BLU.
 - d. Untuk Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional non-PNS/Prajurit TNI/Anggota POLRI, THR dan/atau Gaji Ketiga Belas diberikan dengan besaran paling tinggi sebesar yang dibayarkan kepada Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai BLU yang berasal dari PNS/PPPK/Prajurit TNI/Anggota POLRI pada jabatan dengan kelas jabatan yang setara. Adapun ketentuan terkait penyetaraan kelas jabatan dimaksud ditetapkan dengan keputusan pemimpin BLU, dengan berpedoman pada jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatan yang setara pada instansi induk satker BLU.
2. Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas pada BLU yang **belum menerapkan remunerasi** dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- a. THR dan Gaji Ketiga Belas diberikan untuk Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai BLU yang berasal dari PNS/PPPK/Prajurit TNI/Anggota POLRI sebesar komponen penghasilan berupa gaji dan tunjangan kinerja yang bersumber dari Rupiah Murni dengan ketentuan:
 - 1) Mengacu pada tata cara pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas di instansi pemerintah yang menjadi induk satker BLU sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
 - 2) Gaji sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan sebesar gaji yang dibayarkan pada bulan Maret 2024 untuk THR dan bulan Mei 2024 untuk Gaji Ketiga Belas dengan komponen sebagaimana diatur dalam pengaturan umum gaji bagi PNS/PPPK/Prajurit TNI/Anggota POLRI.

- 3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan sebesar tunjangan kinerja yang dibayarkan pada bulan Maret 2024 untuk THR dan bulan Mei 2024 untuk Gaji Ketiga Belas.
- b. THR dan/atau Gaji Ketiga Belas diberikan untuk Pejabat Pengelola dan/atau Pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional non-PNS/Prajurit TNI/Anggota POLRI sebesar komponen penghasilan yang bersumber dari Rupiah Murni dan/atau PNBP BLU sebagaimana ketentuan dalam perjanjian kerja/kontrak atau surat keputusan kepegawaian.
3. Lebih lanjut terkait pemberian THR dan/atau Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional non-PNS/Prajurit TNI/Anggota POLRI dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tenaga profesional non-PNS/Prajurit TNI/Anggota POLRI memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) Diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Pada saat Peraturan Pemerintah tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 diundangkan, telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja;
 - 4) Dalam hal belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun, THR dan/atau Gaji Ketiga Belas dapat diberikan apabila dalam perjanjian kerja telah dinyatakan berhak menerima THR dan/atau Gaji Ketiga Belas; dan
 - 5) Pendanaan belanja pegawainya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, termasuk bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak BLU (PNBP BLU).
 - b. Besaran THR dan/atau Gaji Ketiga Belas adalah sebagaimana ketentuan dalam perjanjian kerja/kontrak atau surat keputusan kepegawaian.
4. Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas pada satker BLU yang besaran komponen penghasilannya diatur pada Peraturan Presiden tersendiri, dapat dibayarkan sebesar nominal yang tercantum pada Peraturan Presiden pada masing-masing BLU.
5. Dalam hal Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan/atau Pegawai BLU menerima lebih dari 1 (satu) THR dan Gaji Ketiga Belas, maka THR dan Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) THR dan Gaji Ketiga Belas yang jumlahnya paling besar.
6. THR dan Gaji Ketiga Belas yang diterima para Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan/atau Pegawai BLU tidak dikenakan iuran dan/atau potongan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. Perlakuan Perpajakan

Terhadap THR dan Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan, dikenakan pajak penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk THR dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari RM, ditanggung oleh Pemerintah dalam hal ini instansi induk pembayar gaji dan tunjangan sesuai mekanisme yang dilakukan untuk pembayaran gaji dan tunjangan sumber RM.

2. Untuk THR dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari PNPB, ditanggung oleh Pemerintah dalam hal ini BLU melalui akun belanja gaji dan tunjangan yang digunakan dalam rangka pembayaran remunerasi sumber PNPB BLU.

V. Mekanisme Penganggaran dan Pembayaran

1. Pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan/atau Pegawai pada BLU dianggarkan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BLU berkenaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLU.
2. Mekanisme pengajuan, penyampaian, serta proses penggunaan aplikasi terkait pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mekanisme pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Rupiah Murni, melalui penerbitan SPM langsung ke rekening penerima dengan mengikuti tata cara ataupun petunjuk teknis terkait pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas tahun 2024 yang ada pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan/atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mitra kerja masing-masing BLU.
 - b. Mekanisme pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari PNPB, dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pengesahan belanja menggunakan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum (SP3B BLU) tersendiri.
3. Pembayaran THR pada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan/atau Pegawai pada BLU dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya, sesuai dengan mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka V.2. Dalam hal THR belum dapat dibayarkan pada 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya, THR dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
4. Pembayaran Gaji Ketiga Belas pada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan/atau Pegawai pada BLU dibayarkan paling cepat bulan Juni 2024, sesuai dengan mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka V.2. Dalam hal Gaji Ketiga Belas belum dapat dibayarkan pada bulan Juni 2024, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni 2024.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani. Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perbendaharaan



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti

Tembusan:

1. Pembina Teknis Kementerian Negara/Lembaga (terlampir)
2. Para Dewan Pengawas BLU (terlampir)
3. Kepala Kantor Wilayah DJPb (terlampir)
4. Direktur Pelaksanaan Anggaran
5. Direktur Sistem Perbendaharaan



Lampiran I
 Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan
 Nomor : S-53/PB/2024
 Tanggal : 24 Maret 2024

Yth. Para Pemimpin BLU:

Kementerian Sekretariat Negara (007)

1. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno
2. Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran

Kementerian Pertahanan (012)

1. RSPAD Gatot Subroto
2. RS Tk. II Putri Hijau, Medan
3. RS Tk. II Dustira, Cimahi
4. RS Tk. III Ciremai, Cirebon
5. RS Tk. II Soepraen, Malang
6. RS Tk. II Pelamonia, Makassar
7. RS Tk. I dr. Ramelan, Wonokromo, Surabaya
8. RS Tk. I RSPAU dr. S. Hardjolukito, Yogyakarta
9. RSAU dr. Esnawan Antariksa, Jakarta
10. RSAU Dr. M. Salamun, Bandung
11. RS Tk. II Udayana Kodam IX/Denpasar
12. RS Tk. II Kartika Husada Kodam XII/Tanjung Pura, Kalbar
13. RS Tk. II dr. Soedjono Kodam IV/Diponegoro, Magelang
14. RS Tk. II R.W. Monginsidi Kodam XIII/Merdeka, Manado
15. RS Tk. II Prof. dr. J.A. Latumenten Kodam XVI/Patimura, Ambon
16. RS Tk. III Wijayakusuma Purwokerto
17. RS Tk. III Bratanata Jambi
18. RS Tk. II Moch. Ridwan Meuraksa Kesdam Jaya, Jakarta
19. RS Tk. IV. Salak Kesdam III/Slw, Bogor
20. RS Tk. IV. Guntur Kesdam III/Slw, Garut
21. RS Tk. II Iskandar Muda Kesdam IM, Banda Aceh
22. RS Tk. II dr. A.K. Gani Kesdam II/Swj, Palembang
23. RS Tk. II dr. R. Hardjanto Kesdam VI/MIw, Balikpapan
24. RS Tk. II Marthen Indey Kesdam XVII/Cen, Jayapura
25. Rumkital DR. Mintohardjo
26. Ladokgi R.E. Martadinata
27. Rumkital DR. Midiato
28. Ladokgi Yos Sudarso
29. Rumkitmar Cilandak
30. RS dr. Suyoto Kemhan

Kementerian Keuangan (015)

1. Pusat Investasi Pemerintah (PIP)
2. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)
3. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kepala Sawit
4. Lembaga Manajemen Aset Negara
5. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
6. Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional
7. Politeknik Keuangan Negara STAN

Kementerian Pertanian (018)

1. Pusat Veteriner Farma Surabaya

2. Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari

3. Balai Inseminasi Buatan Lembang

Kementerian Perindustrian (019)

1. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA)

2. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT)

3. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Jakarta

4. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri

5. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya

6. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim

7. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan

8. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bandar Lampung

9. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda

10. Politeknik AKA Bogor

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (020)

1. Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS

2. Politeknik Energi dan Mineral AKAMIGAS

3. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi

4. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara

5. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

6. Balai Besar Survey dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

7. Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara

8. Balai Besar Survey dan Pemetaan Geologi Kelautan

Kementerian Perhubungan (022)

1. Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta

2. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta

3. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang

4. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar

5. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal

6. Politeknik Pelayaran Surabaya

7. Politeknik Penerbangan Surabaya

8. Politeknik Penerbangan Makassar

9. Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh

10. Politeknik Pelayaran Banten

11. Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun

12. Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang

13. Politeknik Transportasi Darat Bali

14. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta

15. Politeknik Penerbangan Palembang

16. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Curug

17. Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan

18. Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi

19. Politeknik Penerbangan Jayapura

20. Kantor UPBU Juwata, Tarakan

21. Kantor UPBU Mutiara Sis Al-Jufri, Palu

22. Kantor UPBU Djalaluddin, Gorontalo

23. Kantor UPBU Kalimantan, Kaltim

24. Kantor UPBU Haluoleo
25. Kantor UPBU Sultan Babullah Ternate
26. Kantor UPBU Rendani Manokwari
27. Kantor UPBU Domine Eduard Osok Sorong
28. Kantor UPBU APT Pranoto Samarinda
29. Kantor UPBU Mozes Kilangin
30. Politeknik Pelayaran Sorong
31. Politeknik Penerbangan Indonesia Curug
32. Politeknik Penerbangan Medan
33. Politeknik Transportasi Darat Indoensia - STTD Bekasi
34. Politeknik Pelayaran Barombong
35. Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara
36. Politeknik Pelayaran Sumatera Barat
37. Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan
38. Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor di Bekasi
39. Distrik Navigasi Tanjung Priok
40. Balai Pengujian Perkeretaapian
41. Balai Kesehatan Penerbangan
42. Balai Kesehatan Pelayaran

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (023)

1. Universitas Mulawarman
2. Universitas Lampung
3. Universitas Gorontalo
4. Universitas Bengkulu
5. Universitas Sriwijaya
6. Universitas Negeri Jakarta
7. Universitas Jenderal Soedirman
8. Universitas Haluoleo
9. Universitas Udayana
10. Universitas Riau
11. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten
12. Universitas Mataram
13. Universitas Tadulako
14. Universitas Pendidikan Ganesha
15. Universitas Nusa Cendana
16. Universitas Jambi
17. Universitas Sam Ratulangi
18. Universitas Tanjungpura
19. Universitas Negeri Medan
20. Universitas Pattimura, Ambon
21. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
22. Universitas Negeri Makassar
23. Universitas Jember
24. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
25. Universitas Singaperbangsa Karawang
26. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
27. Universitas Khairun
28. Universitas Negeri Manado
29. Universitas Lambung Mangkurat
30. Politeknik Negeri Malang

31. Politeknik Manufaktur Bandung
32. Politeknik Negeri Semarang
33. Politeknik Negeri Jakarta
34. Politeknik Negeri Bali
35. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
36. Politeknik Negeri Ujung Pandang
37. Politeknik Negeri Bandung
38. Politeknik Negeri Medan
39. Museum dan Cagar Budaya
40. Universitas Trunodjoyo Madura
41. Institut Seni Indonesia Padang Panjang
42. Universitas Palangkaraya
43. Universitas Cendrawasih
44. Universitas Malikussaleh
45. Politeknik Negeri Sriwijaya
46. Politeknik Negeri Jember
47. Politeknik Negeri Pontianak
48. Politeknik Negeri Batam
49. Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan
50. Universitas Bangka Belitung

Kementerian Kesehatan (024)

1. RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta
2. RSUP Fatmawati Jakarta
3. RSUP Persahabatan Jakarta
4. RS Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta
5. RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta
6. RS Kanker Dharmas Jakarta
7. RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung
8. RSUP dr. Kariadi Semarang
9. RSUP Prof. dr. I.G.N.G Ngoerah Denpasar
10. RSUP dr. Muhammad Hoesin Palembang
11. RSUP Dr.M Djamil Padang
12. RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar
13. RSUP dr.Sardjito Yogyakarta
14. RSUP dr. H. Adam Malik Medan
15. RSUP Prof. dr. RD Kandou Manado
16. RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
17. RS Jiwa dr. Marzoeki Mahdi Bogor
18. RSJ Prof dr. Soerojo Magelang
19. RS Orthopedi Prof. dr. R. Soeharso Surakarta
20. RS Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang
21. RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga
22. RS Mata Cicendo Bandung
23. RS. Otak Dr. Drs. M. Hatta Bukittinggi
24. RS. Paru dr. M. Goenawan Partowidigdo Bogor
25. RS Jiwa dr. Soeharto Heerdjan Jakarta
26. RSPI Prof. dr. Sulianti Saroso Jakarta
27. RSUP dr. Sitanala Tangerang
28. RS Paru dr. HA Rotinsulu Bandung
29. RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta

30. RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar
31. RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang
32. RSUP Surakarta
33. RS Ketergantungan Obat Jakarta
34. RS Mata Makassar
35. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung
36. Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Makassar
37. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jakarta
38. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya
39. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang
40. Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar
41. Balai Penngamanan Fasilitas Kesehatan Jakarta
42. Politeknik Kesehatan Jakarta III
43. Politeknik Kesehatan Bandung
44. Politeknik Kesehatan Medan
45. Politeknik Kesehatan Semarang
46. Politeknik Kesehatan Makassar
47. Politeknik Kesehatan Jakarta II
48. Politeknik Kesehatan Surabaya
49. Politeknik Kesehatan Tanjungkarang
50. Politeknik Kesehatan Surakarta
51. Politeknik Kesehatan Malang
52. Politeknik Kesehatan Pontianak
53. Politeknik Kesehatan Yogyakarta
54. Politeknik Kesehatan Bengkulu
55. Politeknik Kesehatan Padang
56. Politeknik Kesehatan Jambi
57. Politeknik Kesehatan Palembang
58. Politeknik Kesehatan Denpasar
59. Politeknik Kesehatan Tasikmalaya
60. Politeknik Kesehatan Mataram
61. Politeknik Kesehatan Kupang
62. Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur
63. Politeknik Kesehatan Banjarmasin
64. Politeknik Kesehatan Manado
65. Politeknik Kesehatan Palu
66. Politeknik Kesehatan Palangkaraya
67. Politeknik Kesehatan Aceh
68. Politeknik Kesehatan Maluku
69. Politeknik Kesehatan Banten
70. Politeknik Kesehatan Riau
71. Politeknik Kesehatan Gorontalo
72. Politeknik Kesehatan Kendari
73. Politeknik Kesehatan Sorong

Kementerian Agama (025)

1. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
2. UIN Raden Fatah Palembang
3. UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
4. UIN Walisongo Semarang
5. UIN Sumatera Utara

6. UIN Sultan Syarif Kasim Riau
7. UIN Sultan Thaha Saifuddin, Jambi
8. UIN Sunan Ampel Surabaya
9. UIN Sunan Gunung Djati, Bandung
10. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
11. UIN Mataram
12. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
13. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
14. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
15. UIN Imam Bonjol Padang
16. UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
17. UIN Salatiga
18. IAIN Syekh Nurjati Cirebon
19. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
20. UIN Alauddin Makassar
21. IAIN Palopo
22. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
23. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
24. UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
25. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
26. UIN Mahmud Yunus Batusangkar
27. UIN Raden Intan Lampung
28. UIN Raden Mas Said Surakarta
29. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Kementerian Kelautan dan Perikanan (032)

1. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal
2. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara
3. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPBB) Karawang
4. Balai Perikanan Budidaya Air Olayau Situbondo
5. Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo
6. Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (040)

1. Badan Pelaksana Otorita Borobudur
2. Badan Pelaksana Otorita Danau Toba
3. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (044)

1. Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah (LLPKUKM)
2. Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM

Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

1. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI)

Kepolisian Negara Republik Indonesia (060)

1. RS Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto Jakarta
2. RS Bhayangkara Tk. II Mappa Oudang, Makassar
3. RS Bhayangkara Tk. II Semarang
4. RS Bhayangkara Tk. II HS. Samsoeri Mertojoso, Surabaya
5. RS Bhayangkara TK. II Kediri
6. RS Bhayangkara Tk.II Sartika Asih Bandung
7. RS Bhayangkara Tk. II Medan
8. RS Bhayangkara Tk. III Pusdik Sabhara Porong
9. RS Bhayangkara Tk.III Palembang

10. RS Bhayangkara Tk. III Nganjuk
11. RS Bhayangkara Tk. III Tulungagung
12. RS Bhayangkara Tk. III Lumajang
13. RS Bhayangkara Tk. III Bondowoso
14. RS Bhayangkara Tk. III Jayapura
15. RS Bhayangkara Tk. III Korbrimob Kelapa Dua
16. RS Bhayangkara Tk. III Setukpa Sukabumi
17. RS Bhayangkara Tk. III Bengkulu
18. RS Bhayangkara Tk. III Banjarmasin
19. RS Bhayangkara Tk. III Pontianak
20. RS Bhayangkara Tk. III Kupang
21. RS Bhayangkara Tk. III Kendari
22. RS Bhayangkara Tk. III Jambi
23. RS Bhayangkara Tk. III Lemdiklat Polri
24. RS Bhayangkara Tk. III Padang
25. RS Bhayangkara Tk. III Pekanbaru
26. RS Bhayangkara Tk. III Denpasar
27. RS Bhayangkara Tk. III Yogyakarta
28. RS Bhayangkara Tk. III Palangkaraya
29. RS Bhayangkara Tk. III Balikpapan
30. RS Bhayangkara Tk. III Manado
31. RS Bhayangkara Tk. III Mataram
32. RS Bhayangkara Tk. III Palu
33. RS Bhayangkara Tk. III Hasta Brata Batu Malang
34. RS Bhayangkara Tk. III Wahyu Tutuko Bojonegoro
35. RS Bhayangkara Tk. III Indramayu
36. RS Bhayangkara Tk. III Bandar Lampung
37. RS Bhayangkara Tk. III Tebing Tinggi
38. RS Bhayangkara Tk. III Watukosek, Jatim Pusdik Brimob Lemdiklat POLRI
39. RS Bhayangkara Tk. III Ambon
40. RS Bhayangkara Tk. IV Banda Aceh
41. RS Bhayangkara Batam
42. RS Bhayangkara Mamuju

Kementerian Pemuda dan Olahraga (092)

1. Lembaga Pengelola Dana & Usaha Keolahragaan (LPDUK)

Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (112)

1. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (118)

1. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

Badan Riset dan Inovasi Nasional (124)

1. Pusat Pelayanan Teknologi

Lampiran II
 Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan
 Nomor : S-53/PB/2024
 Tanggal : 24 Maret 2024

Tembusan:

Para Pembina Teknis BLU:

Kementerian Sekretariat Negara (007)

1. Sekretaris, Kementerian Sekretariat Negara

Kementerian Pertahanan (012)

1. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, Kementerian Pertahanan
2. Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat
3. Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut
4. Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara
5. Kepala Staf TNI Angkatan Darat
6. Kepala Staf TNI Angkatan Laut

Kementerian Keuangan (015)

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
3. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan

Kementerian Pertanian (018)

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian
2. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian

Kementerian Perindustrian (019)

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perindustrian
2. Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Kementerian Perindustrian
3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Kementerian Perindustrian
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (020)

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kementerian Perhubungan (022)

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan
2. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan
3. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (023)

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
3. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

Kementerian Kesehatan (024)

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan

3. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan
4. Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan

Kementerian Agama (025)

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Agama
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama

Kementerian Kelautan dan Perikanan (032)

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (035)

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Dewan Kawasan Batam
2. Gubernur Aceh sebagai Ketua Dewan Kawasan Sabang

Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (044)

1. Deputi Bidang Perkoperasian, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kepolisian Negara Republik Indonesia (060)

1. Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Kepolisian RI
2. Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI
3. Kepala Pusat Keuangan POLRI

Kementerian Pemuda dan Olahraga (092)

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pemuda dan Olahraga
2. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga

Dewan Pengawas BLU:**Kementerian Sekretariat Negara (007)**

1. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno
2. Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran

Kementerian Pertahanan (012)

1. RSPAD Gatot Subroto
2. RS Tk. II Putri Hijau, Medan
3. RS Tk. II Dustira, Cimahi
4. RS Tk. III Ciremai, Cirebon
5. RS Tk. II Soepraen, Malang
6. RS Tk. II Pelamonia, Makassar
7. RS Tk. I dr. Ramelan, Wonokromo, Surabaya
8. RS Tk. I RSPAU dr. S. Hardjolukito, Yogyakarta
9. RSAU dr. Esnawan Antariksa, Jakarta
10. RSAU Dr. M. Salamun, Bandung
11. RS Tk. II Udayana Kodam IX/Denpasar
12. RS Tk. II Kartika Husada Kodam XII/Tanjung Pura, Kalbar
13. RS Tk. II dr. Soedjono Kodam IV/Diponegoro, Magelang
14. RS Tk. II R.W. Monginsidi Kodam XIII/Merdeka, Manado
15. RS Tk. II Prof. dr. J.A. Latumenten Kodam XVI/Patimura, Ambon
16. RS Tk. III Wijayakusuma Purwokerto
17. RS Tk. III Bratanata Jambi
18. RS Tk. II Moch. Ridwan Meuraksa Kesdaam Jaya, Jakarta
19. RS Tk. IV. Salak Kesdaam III/Slw, Bogor
20. RS Tk. IV. Guntur Kesdaam III/Slw, Garut
21. RS Tk. II Iskandar Muda Kesdaam IM, Banda Aceh
22. RS Tk. II dr. A.K. Gani Kesdaam II/Swj, Palembang
23. RS Tk. II dr. R. Hardjanto Kesdaam VI/Mlw, Balikpapan
24. RS Tk. II Marthen Indey Kesdaam XVII/Cen, Jayapura

Kementerian Keuangan (015)

1. Pusat Investasi Pemerintah (PIP)
2. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)
3. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kepala Sawit
4. Lembaga Manajemen Aset Negara
5. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
6. Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional

Kementerian Pertanian (018)

1. Pusat Veteriner Farma Surabaya
2. Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari
3. Balai Inseminasi Buatan Lembang

Kementerian Perindustrian (019)

1. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro (BBSPJIA)
2. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (020)

1. Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS
2. Politeknik Energi dan Mineral Akamigas, Blora
3. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi, Blora
4. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral dan Batubara, Bandung

5. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Jakarta

Kementerian Perhubungan (022)

1. Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta
2. Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta
3. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang
4. Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar
5. Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal
6. Politeknik Pelayaran Surabaya
7. Politeknik Penerbangan Surabaya
8. Politeknik Penerbangan Makassar
9. Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh
10. Politeknik Pelayaran Banten
11. Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun
12. Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang
13. Politeknik Transportasi Darat Bali
14. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta
15. Politeknik Penerbangan Palembang
16. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Curug
17. Balai Kesehatan Penerbangan
18. Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan
19. Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi
20. Politeknik Penerbangan Jayapura
21. UPBU Juwata, Tarakan
22. UPBU Mutiara Sis Al-Jufri, Palu
23. UPBU Djalaluddin, Gorontalo
24. Politeknik Pelayaran Sorong
25. UPBU Kalimantan, Kaltim
26. Politeknik Penerbangan Indonesia Curug
27. Politeknik Penerbangan Medan
28. Politeknik Transportasi Darat Indonesia - Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi
29. Politeknik Pelayaran Barombong
30. Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (023)

1. Universitas Mulawarman
2. Universitas Lampung
3. Universitas Gorontalo
4. Universitas Bengkulu
5. Universitas Sriwijaya
6. Universitas Negeri Jakarta
7. Universitas Jenderal Soedirman
8. Universitas Haluoleo
9. Universitas Udayana
10. Universitas Riau
11. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten
12. Universitas Mataram
13. Universitas Tadulako
14. Univ. Pendidikan Ganesha
15. Universitas Nusa Cendana
16. Universitas Jambi

17. Universitas Sam Ratulangi
18. Universitas Tanjungpura
19. Universitas Negeri Medan
20. Universitas Pattimura, Ambon
21. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
22. Universitas Negeri Makassar
23. Universitas Jember
24. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
25. Universitas Singaperbangsa Karawang
26. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
27. Universitas Khairun
28. Universitas Negeri Manado
29. Universitas Lambung Mangkurat
30. Politeknik Negeri Malang
31. Politeknik Manufaktur Bandung
32. Politeknik Negeri Semarang
33. Politeknik Negeri Jakarta
34. Politeknik Negeri Bali
35. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya
36. Politeknik Negeri Ujung Pandang
37. Politeknik Negeri Bandung
38. Politeknik Negeri Medan
39. Museum Nasional Jakarta

Kementerian Kesehatan (024)

1. RSUP Nasional dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta
2. RSUP Fatmawati Jakarta
3. RSUP Persahabatan Jakarta
4. RS Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta
5. RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta
6. RS Kanker Dharmas Jakarta
7. RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung
8. RSUP dr. Kariadi Semarang
9. RSUP Prof. dr. I.G.N.G Ngoerah Denpasar
10. RSUP dr. Muhammad Hoesin Palembang
11. RSUP Dr. M. Djamil Padang
12. RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar
13. RSUP dr. Sardjito Yogyakarta
14. RSUP dr. H. Adam Malik Medan
15. RSUP Prof. dr. RD Kandou Manado
16. RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
17. RS Jiwa dr. Marzuki Mahdi Bogor
18. RSJ Prof dr. Soerojo Magelang
19. RS Orthopedi Prof. dr. R. Soeharso Surakarta
20. RS Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang
21. RS Paru dr. Ario Wirawan Salatiga
22. RS Mata Cicendo Bandung
23. RS. Otak Dr. Drs. M. Hatta Bukittinggi
24. RS. Paru dr. M. Goenawan Partowidigdo Bogor
25. RS Jiwa dr. Soeharto Heerdjan Jakarta
26. RSPI Prof. dr. Sulianti Saroso Jakarta

27. RSUP dr. Sitanala Tangerang
28. RS Paru dr. HA Rotinsulu Bandung
29. Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta
30. RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar
31. Politeknik Kesehatan Jakarta III
32. Politeknik Kesehatan Bandung
33. Politeknik Kesehatan Medan
34. Politeknik Kesehatan Semarang
35. Politeknik Kesehatan Makassar
36. Politeknik Kesehatan Jakarta II
37. Politeknik Kesehatan Surabaya
38. Politeknik Kesehatan Tanjung Karang
39. Politeknik Kesehatan Surakarta
40. Politeknik Kesehatan Malang
41. Politeknik Kesehatan Pontianak
42. Politeknik Kesehatan Yogyakarta
43. Politeknik Kesehatan Bengkulu

Kementerian Agama (025)

1. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
2. UIN Raden Fatah Palembang
3. UIN Ar-Raniry Aceh
4. UIN Walisongo Semarang
5. UIN Sumatera Utara
6. UIN Sultan Syarif Kasim Riau
7. UIN Sultan Thaha Saifuddin, Jambi
8. UIN Sunan Ampel Surabaya
9. UIN Sunan Gunung Djati, Bandung
10. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
11. UIN Mataram
12. Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
13. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
14. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
15. UIN Imam Bonjol Padang
16. UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
17. Universitas Islam Negeri Salatiga
18. IAIN Syekh Nurjati Cirebon
19. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
20. UIN Alauddin Makassar

Kementerian Kelautan dan Perikanan (032)

1. Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (035)

1. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
2. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (044)

1. Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah (LLPKUKM)
2. Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM

Kementerian Komunikasi dan Informatika (059)

1. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI)

Kepolisian Negara Republik Indonesia (060)

1. RS Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto Jakarta

2. RS Bhayangkara Tk. II Mappa Oudang, Makassar
3. RS Bhayangkara Tk. II Semarang
4. RS Bhayangkara Tk. II HS. Samsoeri Mertojoso, Surabaya
5. RS Bhayangkara TK. II Kediri
6. RS Bhayangkara Tk.II Sartika Asih Bandung
7. RS Bhayangkara Tk. II Medan
8. RS Bhayangkara Tk. III Pusdik Sabhara Porong
9. RS Bhayangkara Tk.III Palembang
10. RS Bhayangkara Tk. III Nganjuk
11. RS Bhayangkara Tk. III Tulungagung
12. RS Bhayangkara Tk. III Lumajang
13. RS Bhayangkara Tk. III Bondowoso
14. RS Bhayangkara Tk. III Jayapura
15. RS Bhayangkara Tk. III Korbrimob Kelapa Dua
16. RS Bhayangkara Tk. III Setukpa Sukabumi
17. RS Bhayangkara Tk. III Bengkulu
18. RS Bhayangkara Tk. III Banjarmasin
19. RS Bhayangkara Tk. III Pontianak
20. RS Bhayangkara Tk. III Kupang
21. RS Bhayangkara Tk. III Kendari
22. RS Bhayangkara Tk. III Jambi
23. RS Bhayangkara Tk. III Lemdiklat Polri
24. RS Bhayangkara Tk. III Padang
25. RS Bhayangkara Tk. III Pekanbaru
26. RS Bhayangkara Tk. III Denpasar
27. RS Bhayangkara Tk. III Yogyakarta
28. RS Bhayangkara Tk. III Palangkaraya
29. RS Bhayangkara Tk. III Balikpapan
30. RS Bhayangkara Tk. III Manado
31. RS Bhayangkara Tk. III Mataram
32. RS Bhayangkara Tk. III Palu
33. RS Bhayangkara Tk. III Hasta Brata Batu Malang
34. RS Bhayangkara Tk. III Wahyu Tutuko Bojonegoro
35. RS Bhayangkara Tk. III Indramayu
36. RS Bhayangkara Tk. III Bandar Lampung
37. RS Bhayangkara Tk. III Tebing Tinggi
38. RS Bhayangkara Tk. III Watukosek, Jatim Pusdik Brimob Lemdiklat POLRI
39. RS Bhayangkara Tk. III Ambon
40. RS Bhayangkara Tk. IV Banda Aceh

Kementerian Pemuda dan Olahraga (092)

1. Lembaga Pengelola Dana & Usaha Keolahragaan (LPDUK)

Kepala Kantor Wilayah DJPb:

1. Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi Aceh
2. Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi Sumatera Utara
3. Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi Sumatera Barat
4. Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi Riau
5. Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi Kepulauan Riau
6. Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi Jambi
7. Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi Sumatera Selatan
8. Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi Lampung
9. Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi Bengkulu
10. Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi Bangka Belitung
11. Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi Banten
12. Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi DKI Jakarta
13. Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi Jawa Barat
14. Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi Jawa Tengah
15. Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi D.I. Yogyakarta
16. Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi Jawa Timur
17. Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi Kalimantan Barat
18. Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi Kalimantan Tengah
19. Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi Kalimantan Selatan
20. Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi Kalimantan Timur
21. Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi Kalimantan Utara
22. Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi Bali
23. Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi Nusa Tenggara Barat
24. Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi Nusa Tenggara Timur
25. Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi Sulawesi Selatan
26. Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi Sulawesi Barat
27. Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi Sulawesi Tengah
28. Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi Sulawesi Tenggara
29. Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi Gorontalo
30. Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi Sulawesi Utara
31. Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi Maluku Utara
32. Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi Maluku
33. Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi Papua Barat
34. Kantor Wilayah Ditjen PBN Provinsi Papua